HISTORIA VITAE
Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

HISTORIA VITAE, *Vol. 04, No. 01, April 2024*

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR PESERTA DIDIK TENTANG HAK PEREMPUAN MELALUI PEMBELAJARAN SEJARAH

Shintya ayunityas
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
E-mail : Shintyaayunityas29@gmail.com

ABSTRAK

Dalam perbincangan sejarah selama ini, peran perempuan dalam perjalanan sejarah di Indonesia masihlah sedikit untuk diulas dalam pembelajaran di kelas. Sekiranya dalam historiografi, kurangnya pembahasan mengenai peran perempuan cukuplah menjadi sebuah perhatian dan perbincangan oleh para ahli sejarah. Karena secara faktanya, kedudukan yang diberikan kepada peran perempuan inilah membuat sebuah perbandingan yang ditunjukkan kepada kaum laki-laki yang kemudian terdapat pada sejarah Indonesia. Selain itu, pemberian hak yang sama antara laki- laki dan perempuan masih sulit untuk didapat dalam bidang pendidikan, sosial dan politik pada masa perjalanan Indonesia dahulu. Sehingga memunculkan adanya pemikiran –pemikiran yang tercetus dari tokoh pahlawan wanita Indonesia, yang kemudian dapat dijadikan sebuah landasan dalam pendidikan. Dengan cara menyisipkan nilai-nilai keteladanan yang ditujukan kepada para peserta didik untuk mewujudkan suatu pemahaman yang kuat terhadap pembelajaran, terkhususnya dalam pembelajaran sejarah mengenai penegakkan hak perempuan melalui perjuangan para tokoh pahlawan wanita. Yang memiliki tujuan untuk meningkatkan daya berpikir kritis peserta didik terhadap pembahasan hak perempuan yang nantinya dapat dihubungkan dengan kehidupan saat ini.

Kata kunci : Pembelajaran Sejarah, Tokoh Perempuan, Hak Perempuan, Kemampuan Berpikir.

ABSTRACT

In historical discussions so far, the role of women in the course of history in Indonesia is still little to be discussed in classroom learning. If in historiography, the lack of discussion regarding the role of women is sufficient to be a concern and discussion by historians. Because in fact, the position given to the role of women makes a comparison shown to men which later occurs in Indonesian history. In addition, the provision of equal rights between men and women is still difficult to obtain in the educational, social and political fields during Indonesia's former journey. So that it gave rise to thoughts - thoughts that sparked from Indonesian heroines, which can then be used as a foundation in education. By inserting exemplary values aimed at students to create a strong understanding of learning, especially in learning history regarding upholding women's rights through the struggles of female heroines. Which has the aim of increasing students' critical thinking power towards discussing women's rights which can later be linked to current life.

Keywords: *History Learning, Women Leaders, Women's Rights, Thinking Skills.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan manusia memahami kemampuan akan dirinya, memiliki rasa bertanggung jawab serta menanamkan norma dan nilai sosial. Sehingga dapat dikatakan melalui pendidikan, individu akan mengalami perubahan tata laku dan sikap secara berproses yang kemudian akan dapat berguna bagi masyarakat dan bangsa di masa depan. Hal tersebut selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam UU No.20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa "Pendidikan nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi dari peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Sebagai muatan pendidikan, sejarah menjadi salah satu pengembang yang memiliki peranan dalam membekali peserta didiknya untuk membentuk pribadi dengan karakter yang terintegrasi. Pada jenjang sekolah menengah pendidikan sejarah memiliki posisi yang strategis dalam membentuk watak sebagai bangsa yang bermartabat serta membentuk rasa cinta tanah air dalam jiwa manusia Indonesia, meningkatkan kemampuan berpikir dan memiliki kemampuan untuk mengadopsi pengetahuan akan pemaknaan peristiwa sejarah dalam kehidupan sosialnya (Hapsari,2011:14) . Ketercapaian pada tujuan pendidikan tersebut dapat terlaksana apabila cara pembawaan manajemen pembelajaran memiliki relevansi terhadap karakteristik peserta didik dan tantangan zaman yang dihadapi sekarang. Melalui proses pembelajaran inilah peserta didik dapat menjadi manusia yang kritis dalam berpikir.

Kemampuan berpikir kritis terhadap peristiwa sejarah perlu didapatkan oleh peserta didik sebagai bagian untuk membangun pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui cara bertanya, memiliki rasa ingin tahu, memiliki sebuah solusi, serta menganalisa fakta juga menolak informasi yang terlihat tidak relevan. Pembelajaran yang menarik dengan membawa isu-isu kontemporer ke dalam kegiatan belajar mengajar akan memudahkan peserta didik dalam belajar sejarah yang dihubungkan dengan keadaan sekitar mereka. Salah satu materi dalam sejarah yang dapat dibawa oleh pendidik dalam pembelajaran adalah mengenai perjuangan sang perempuan menggapai haknya. Dimana hal ini selalu menjadi pandangan yang dapat dilihat oleh peserta didik di lingkungan masyarakat, sedikit banyaknya diantara kelompok masyarakat masih memandang rendah perempuan. Hal ini sama dengan permasalahan pada sejarah yang masih sedikit dalam memasukkan literasi mengenai perjuangan atas hak perempuan ke dalam peristiwa peristiwa sejarah di Indonesia. Selain itu, keterbatasan dalam ruang gerak perempuan pula menjadi permasalahan seperti dalam kasus memperoleh suatu pengetahuan melalui pendidikan.

Keterbatasan dalam memiliki hak karena mengalami kemunduran terhadap posisi perempuan, menjadi hal yang perlu diselesaikan dengan memberikan pemahaman akan persamaan kedudukan antara kaum laki-laki dengan perempuan tanpa membeda – bedakan. Sehingga hak dan kewajiban dari perempuan akan terpenuhi sama rata dengan keadilan gender yang diberikan.

Memasukkan materi mengenai perjuangan tokoh pahlawan nasional Indonesia seperti RA. Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis dan masih banyak tokoh

perjuangan perempuan lainnya yang kemungkinan masih belum diketahui oleh peserta didik akibat dari sedikitnya pembahasan mengenai perempuan ke dalam buku teks pembelajaran sejarah. Para tokoh pahlawan yang memperjuangkan akan hak – hak atas perempuan, yang dianggap lebih rendah dari laki-laki menjadi salah satu hal yang menarik diajarkan oleh peserta didik dengan menanamkan sikap dan nilai keteladanan dari para tokoh pahlawan wanita. Pengajaran akan sejarah dari perjuangan para tokoh pahlawan wanita dapat menjadi sebuah pegangan dalam memberikan pemahaman hal-hal yang dapat tercapai dari hak yang diperoleh baik dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sosial.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun artikel penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah (Syamsudin,2007).Yang mana melalui beberapa tahapan yaitu tahap heuristik (pengumpulan data), kritik, interpretasi dan historiografi (penulisan sejarah). Tahapan pertama yang dilalui adalah heuristik (pengumpulan data), dengan cara mengumpulkan berbagai data dari artikel dan buku. Dimana proses perolehan data melalui studi kepustakaan, yaitu dari hasil penelitian terdahulu, karya tulis dan buku-buku yang memiliki hubungan dengan pembahasan yang diteliti. Data yang telah terkumpul dan memiliki keterkaitan dengan dengan penelitian, kemudian dilanjut dengan diuji melalui kritik guna mendapatkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap berikutnya yaitu interpretasi, tahap dengan proses penafsiran terhadap data- data yang dikaitkan dengan fakta yang ditemukan dalam berbagai sumber sehingga menghasilkan fakta sejarah. Kemudian fakta- fakta tersebut dirangkai dan dihubungkan antara satu sama lain agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Tahap selanjutnya, adalah historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap ini kerangka dari penulisan sejarah terbentuk dan disusun dalam bentuk laporan atau artikel yang kemudian menjadi historiografi.

PEMBAHASAN

Permasalahan akan seputar kedudukan dari perempuan yang berada pada tingkatan kedua setelah laki- laki masih menjadi persoalan hingga zaman ini, walaupun pada kenyataan banyak perempuan yang dapat memiliki hak sebanding dengan laki- laki dalam hal pekerjaan maupun memimpin sebuah organisasi. Banyak dari masyarakat yang masih menganggap perempuan menjadi makhluk yang lemah sehingga laki-laki yang menjadi makhluk kuat dianggap menjadi pemimpin atau yang berkuasa. Hal tersebut tak jauh pula pada lingkup sejarah, dimana diskriminasi terhadap perempuan telah terjadi. Kaum laki- laki mendominasi sebagian besar dari susunan peristiwa dalam sejarah yang terjadi.

Namun, terdapat pada suatu waktu dimana perempuan terlibat dalam persoalan pembahasan pada berbagai aspek bidang, seperti bidang pendidikan pada masa lalu maupun masa sekarang. Tetapi, pembahasan mengenai perempuan hanya terbatas pada anggapan sebagai subyek bukan obyek. Sehingga hal inilah yang dapat pahami bahwa dalam suatu wacana pemikiran perempuan dianggap sebagai subjek pemikiran saja dan tidak terlibat di dalamnya. Kewajaran tersebut yang menghasilkan isi dari berbagai peristiwa sejarah yang dibukukan hanya dipenuhi oleh nama laki-laki, sedangkan nama perempuan akan muncul jika membicarakan mengenai sejarah perempuan.

Sikap patriarki yang sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu kesulitan bagi perempuan menghapus perubahan akan hak perempuan untuk setingkat dengan kedudukan laki-laki. Yang mana kata patriarki ini telah menjadi sebuah kebudayaan baik dalam lingkungan desa maupun dalam kota besar. Sehingga perlunya penanaman serta pemahaman yang menimbulkan suatu kemampuan berpikir terhadap siswa akan pentingnya hak perempuan di dalam lingkungan masyarakat.

MENGENAI HAK PEREMPUAN

Kata "Hak" hadir sebagai perlindungan terhadap rentannya posisi manusia di dalam proses berbagai bidang, yaitu bidang budaya, sosial, ekonomi serta dalam lingkungan masyarakat (Kristina,2018) . Hak ada dalam setiap manusia dengan sifat mutlaknya dan sudah ada pada saat manusia lahir di dunia. Tujuan adanya hak asasi tersebut adalah berguna untuk menjamin martabat setiap orang, berdasarkan bentuk hukum tanpa adanya campur tangan dari politik tertentu. Sehingga dengan hak, setiap manusia memiliki suatu kebebasan, rasa aman, serta standar hidup yang layak.

Hal tersebut juga tertuju pada perempuan yang mendapat sebuah diskriminasi atau perbedaan perilaku dalam taraf kehidupan bermasyarakat, yang kemudian memunculkan sebuah asumsi budaya negatif terhadap perempuan. Sehingga melalui asumsi negatif seperti ideologis peran tersebut, membentuk sebuah konstruksi dimana keberadaan perempuan baik peran dan kemampuan menjadi terpengaruh terhadap kesempatan perempuan mendapatkan akses di berbagai sistem, kelembagaan, maupun tingkatan. Berdasar dari berbagai hukum, hak asasi perempuan yang merupakan suatu hak yang dimiliki perempuan yang mana pengakuan atas hak seorang perempuan telah diatur dalam hak asasi manusia.

Adapun pengertian hak perempuan yaitu hak-hak yang sama atau setara seperti hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki. Hak-hak ini meliputi berbagai bidang antara lain, hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kebebasan berekspresi, hak suara, hak memiliki properti, dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Terdapat beberapa hak perempuan yang sering menjadi sorotan adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, hak untuk memilih dan dipilih dalam proses politik, hak untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi, hak untuk mendapatkan hak atas warisan, hak untuk bekerja tanpa diskriminasi, dan hak atas pendidikan yang setara dengan laki-laki.

Sampai saat ini, banyak negara dan organisasi internasional yang berupaya untuk memperkuat hak perempuan dan menghilangkan diskriminasi gender. Meskipun masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, perjuangan untuk hak perempuan terus berlanjut di seluruh dunia serta memastikan semua perempuan dapat menikmati hak yang sama dengan kaum laki-laki.Sehingga sangat penting untuk diingat oleh banyak orang, bahwa hak perempuan bukan hanya hak yang harus dipertahankan oleh perempuan semata, tetapi juga tanggung jawab bersama bagi seluruh anggota masyarakat. Selama hak-hak perempuan tidak terpenuhi, maka akan sulit bagi masyarakat untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial yang sebenarnya. Oleh sebab itu, semua orang harus berupaya untuk mendukung dan memperjuangkan hak perempuan agar tercapai kehidupan yang adil dan setara bagi semua.

Sebab dalam kenyataannya, suara- suara yang dikeluarkan mengenai gugatan dalam penghapusan diskriminasi dan gagasan kesetaraan dalam konferensi internasional maupun melalui ratifikasi konvensi internasional lainnya, memiliki ketidaksinkronan pada hasil dari komitmen bersama yang dijalankan. Perbedaan hasil dan proses dari hasil yang dikehendaki, seperti halnya peraturan Undang- Undang, masihlah belum menunjukkan suatu kemajuan yang signifikan pada kehidupan sosial dalam mencapai kesetaraan gendar terhadap harkat dan martabat perempuan. Oleh karena itu, berperan sebagai penjaga HAM suatu negara harus dapat menjamin setiap warganya memperoleh hak-hak secara *dejure* serta yang terpenting yaitu *de facto* (Prantiasih: 2016).

Adapun perbandingan yang ditunjukkan tidak jauh berbeda di zaman Belanda yaitu hak atas perempuan yang ditampilkan di Indonesia sangat terbatas dan terpengaruh oleh norma-norma patriarki yang ada pada masa itu. Secara umum, perempuan di Indonesia pada masa kolonial Belanda memiliki akses yang terbatas pada pendidikan, kesempatan bekerja, serta hak politik. Beberapa hak perempuan yang ada pada zaman Belanda antara lain:

1. Hak atas pendidikan: Pemberian batasan hak dalam bidang pendidikan bagi perempuan dan hanya kalangan tertentu saja yang diberikan hak mengenyam pendidikan. Hanya sedikit perempuan yang diberi kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah yang disediakan oleh pemerintah kolonial Belanda.
2. Hak atas kepemilikan harta: Pada saat itu, harta benda yang dimiliki oleh suami menjadi hak sepenuhnya suami dan tidak ada hak bagi istri dalam memperoleh harta benda tersebut.
3. Hak atas pekerjaan: Perempuan pada masa kolonial umumnya hanya diberi kesempatan untuk bekerja pada bidang-bidang tertentu saja, seperti pengasuh atau pekerja rumah tangga. Sedangkan pekerjaan di luar rumah tangga, seperti di bidang industri atau perdagangan, umumnya hanya diperuntukkan bagi laki-laki.
4. Hak politik: Perempuan pada masa kolonial Belanda tidak memiliki hak untuk memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum.

Akan tetapi, meskipun hak-hak perempuan pada zaman Belanda terbatas, tidak sedikit perempuan Indonesia pada masa itu yang tetap memperjuangkan hak-haknya. Beberapa di antaranya adalah perempuan-perempuan yang tergabung dalam organisasi-organisasi sosial dan politik yang memperjuangkan hak-hak perempuan serta berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia.

TOKOH WANITA DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PEREMPUAN

Guna mencapai sebuah pembebasan dari diskriminasi yang dilakukan masyarakat sosial, Perlunya sebuah keberanian dari seseorang untuk mengubah pikiran rendah terhadap perempuan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghidupkan keadilan gender bagi perempuan di kehidupan bermasyarakat sehingga akan menciptakan sebuah pembebasan bagi perempuan. Yang mana pembebasan memiliki arti dengan menempatkan perempuan diposisi yang sejajar dengan laki- laki baik dalam ideologi maupun teologi sebagai tujuan utama (Huriani,2021).

Dengan mencapai sebuah pembebasan tersebut, diperlukan sebuah pemberdayaan terhadap perempuan sebagai suatu upaya dalam memaksimalkan kemampuan memperoleh kontrol dan akses pada sumber daya berbagai bidang, meliputi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini bertujuan bagi perempuan untuk mengatur diri serta

meningkatkan keberanian pada diri pribadi untuk ikut berperan serta berpartisipasi aktif memecahkan masalah, sampai pada taraf memahami akan kemampuan yang telah memadai. Melalui sebuah kata pembebasan tersebut, kemudian memunculkan sosok perempuan tangguh dan berani dalam melawan sebuah pandangan masyarakat pada masa itu. Tokoh- tokoh pahlawan dengan segala pemikiran dan gagasannya yang menarik untuk dipelajari.

Mulai masuknya penjajahan Belanda di Indonesia tidak hanya membawa dampak negatif bagi keutuhan sistem pemerintahan Nusantara pada saat itu. Namun, juga membawa dampak pula pada penurunan posisi dan peranan perempuan di Indonesia. Melihat keadaan tersebut seorang tokoh wanita bernama Nyai Ahcmad Dahlan atau dikenal dengan Siti Walidah (1872 – 1946), istri pertama dari KH Ahmad Dahlan, memulai perjuangannya terhadap perempuan melalui jalur pendidikan. Perjuangan yang dilakukan oleh Nyai Achmad Dahlan merupakan awal dari kebangkitan pergerakan wanita di Indonesia pada awal abad ke-20 dengan cara mendirikan sebuah organisasi wanita pada tahun 1916 serta membangun pondok pesantren khusus puteri sebagai tempat pelatihan kader santri dan ulama wanita. Tujuan dari adanya lembaga organisasi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam bidang agama, pendidikan, sosial dan ekonomi. Selain itu, juga bertujuan untuk memajukan posisi perempuan dalam masyarakat dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan pada saat itu.

Aisiyah nama organisasi yang dibentuk berfokus pada pendidikan dan pelatihan bagi perempuan. Organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah perempuan, rumah sakit, dan panti asuhan di berbagai daerah di Indonesia. Aisiyah juga menyediakan kursus-kursus keterampilan dan pelatihan bagi perempuan seperti menjahit, memasak, dan berkebun untuk membantu perempuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka. Ia juga mengajarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif, sekaligus mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik untuk mendapatkan pendidikan dan pengakuan sebagai individu yang setara dengan laki-laki. Dengan keberadaan Aisiyah, Siti Walidah membuktikan bahwa perempuan juga dapat menjadi agen perubahan dan memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat dan negara. Aisiyah juga menjadi cikal bakal lahirnya organisasi perempuan lainnya di Indonesia, yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.

Adapula R.A. Karini (1869- 1904) sebagai tokoh pejuang perempuan lain di Jawa Tengah yang memperjuangkan hak wanita melalui jalur pendidikan. Bentuk yang dilakukan dalam menjunjung emansipasi wanita adalah dengan mendirikan sekolah yang ditujukan untuk perempuan pada tahun 1903 yang bertujuan untuk menjadikan perempuan yang cakap, baik, sadar akan nama budinya, serta sanggup menjalankan kewajiban yang besar dalam masyarakat. Dalam menjalankan sekolah tersebut R.A. Kartini tidak menggunakan sistem kurikulum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Hindia melainkan menurut kepada sistem buatannya sendiri yang mana isi konten pengajarannya adalah moral dan budi pekerti. Walaupun tidak menggunakan sistem sekolah sama seperti Pemerintah Belanda, Kartini mampu mencapai keberhasilan dalam mendidik anak- anak.

Selain itu, perjuangan Kartini dalam membantu para perempuan pada zaman itu adalah poligami Menjadi suatu permasalahan yang masih ada sampai sekarang, sehingga melalui pengetahuan akan poligami tersebut RA kartini memiliki pikiran bahwa poligami

menyakiti sesama dan menjadi sebuah perbuatan dosa. Untuk Kartini sendiri melalui jalan membaca dan menulis dapat menjadi proses perjuangan kebebasan perempuan. Pada dasarnya realitas yang ditunjukkan pada masa itu, yaitu kewajiban menjalankan peran ibu rumah tangga, anak gadis dijadikan budak laki-laki, tidak boleh merasakan pendidikan, dan pemberian batasan menikah maksimal umur 12 tahun. Melihat semua kejadian yang tergambar pada kehidupan sekitarnya, Kartini memberikan sebuah perhatian pada para perempuan tentang tidak diberikannya sebuah hak atas kehidupannya sendiri.

Kutipan Djumhur (1996:153) dalam Hartutik (2015) menjelaskan bahwa fenomena yang dilihat oleh R.A. Kartini sangat tidak sesuai dalam masyarakat dan bentuk perlakuan yang dihadapi kaum perempuan Indonesia secara tidak adil serta ditambah kebiasaan membaca, membangkitkan jiwa-jiwa pemberontak dalam diri R.A. Kartini. " Dan adat kebiasaan negeri kami sungguh-sungguh bertentangan dengan kemajuan zaman baru, zaman baru yang saya inginkan masuk ke dalam masyarakat kami" (Surat kepada nona Zeehandelaar, 25 Mei 1899).

Maka dari itu, fenomena yang terlihat pada masa itu menumbuhkan cita-cita pada diri R.A. Kartini dengan usaha usaha yang dilaksanakannya berupa, membuka sekolah gadis di Jepara pada tahun 19-3 dan dibuka kembali sekolah gadis di Rembang setelah ia menikah (Djumhur, 1996:154). Kemudian, mengenai pendidikan perempuan R.A. Kartini memiliki definisi bahwa pendidikan tersebut menerima semua peserta didik perempuan tanpa melihat gelar, kaya, miskin, jabatan maupun warna kulit. Sehingga, dari definisi tersebut sejalan dengan konsep pemikiran R.A. Kartini mengenai konsep pendidikan berbasis emansipasi wanita.

Adapun salah satu dari tokoh perintis pendidikan perempuan di Indonesia, Raden Dewi Sartika yang lahir di Bandung, 4 Desember 1884. Ia mendirikan sebuah sekolah pada 16 Januari 1904 di Paseban Wetan dengan 60 siswa pertama yang mendaftar. Pada tahun 1905 bangunan sekolah dipindahkan dan tahun 1910, Dewi Sartika mengubah nama Sakolah Istri menjadi Sakolah Keotamaan Istri yang lama kelamaan berkembang menjadi sekolah Bumiputera yang terbesar.

Sama seperti kehidupan sosial zaman Kartini, pada zaman Dewi Sartika kehidupan daripada perempuan masihlah terikat oleh adat yang kolot, dan diskriminasi terhadap wanita. Sehingga muncullah sebuah pandangan dari Raden Dewi Sartika, jika kaum perempuan akan mendapat kedudukan sama dengan laki-laki melalui pendidikan. Dalam memperjuangkan kebebasan hak perempuan, Raden Dewi Sartika memiliki pemikiran seperti dalam kutipan Jayuda dkk (2020) berdasar kemukaan Wiraatmajaya (1985: 38), yaitu: "apa yang dibutuhkan pada umumnya untuk meningkatkan wanita pribumi? Menurut pendapat saya yang sederhana wanita dalam hal ini tidak berbeda banyak dari kaum laki-laki. Dia juga untuk pendidikan dengan baik puka. Pengembangan pengetahuan akan berpengaruh terhadap morel wanita pribumi."

Berangkat dari pemikiran tersebut Raden Dewi Sartika dapat diartikan jika pandangan dan pemikiran tersebut adalah perempuan harus hidup dengan terhormat dan sejajar dengan kaum laki- laki, oleh karena itu Raden Dewi Sartika mulai mewujudkan cita-citanya dalam jalur pendidikan dengan membangun sebuah sekolah tahun 1904. Konsep pemikiran dari Raden Dewi Sartika adalah dengan mengajukan kebebasan terhadap perempuan dalam menuntut ilmu dan belajar.

Pada pendirian Sekolah Istri milik Raden Dewi Sartika ini, sekolah berfokus pada keterampilan perempuan, yang mana pokok pendidikan pada Sakolah Istri meliputi, antara lain belajar rumah tangga, seperti menyapu, mengepel; mempelajari adat dan tata cara yang sesuai dengan kedudukan atau asal anak perempuan ini; belajar mengenai kehidupan di dapur; belajar bagaimana cara merawat orang sakit; serta mempelajari ajaran agama. Konsep yang digunakan oleh Raden Dewi Sartika ialah didasari dengan motto *cageur* (sehat), *baguer* (berkepribadian baik), *pinter* (cerdas), *wanter* (mandiri) dan *bener* (hidup di jalan yang benar) (Labibatussolihah et al, 2019 dalam Aeni, 2022). Diwujudkannya perjuangan melalui Sakola Keutamaan Istri ini adalah berguna untuk menginspirasi setiap perempuan baik dari tanah Priangan di masa itu maupun perempuan-perempuan di masa lanjutan di berbagai daerah.

Tidak hanya di Jawa proses dari memperjuangkan hak perempuan dalam lingkungan sosial. Namun, di Minahasa yaitu Maria Walanda Maramis (1917-1924) juga menjadi salah satu tokoh yang memperhatikan bagaimana kehidupan dari seorang wanita pada masa itu. Guna mewujudkan cita-citanya dalam mengangkat kaum perempuan dari ketinggalan dan kebodohan. Maka pada tahun 1917 Maria Walanda Maramis berhasil mendirikan suatu perkumpulan yang bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan terhadap anak – anak gadis agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. PIKAT sebagai nama dari gagasan Maria, kepanjangan dari PIKAT sendiri adalah Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya. Berjalannya waktu PIKAT mulai diperkenalkan dalam rapat terbuka dan selanjutnya berhasil mendirikan sekolah PIKAT atau kerumahtanggaan.

Penjelasan Manus dalam Anjani (2019) terkait organisasi PIKAT sendiri, berdiri dengan memiliki sebuah tujuan, antara lain Menyediakan waktu bagi kaum perempuan Minahasa untuk saling bergaul; Dengan pengetahuan membawa masa depan pemuda Minahasa dan; Membiasakan para perempuan Minahasa untuk berani mengeluarkan pandangan dan pikiran mereka secara bebas.Terdapat dua program di dalam pendirian PIKAT yang dijalankan yaitu penerbitan suatu majalah. Hal ini dilakukan karena majalah penting dalam menyebarluaskan ide-ide PIKAT ke masyarakat dan program kedua yaitu mendirikan sekolah dengan nama "Sekolah Rumah Tangga" yang berguna untuk memutus belenggu sistem sosial dan adat yang telah merusak dan merubah sebagian besar kaum perempuan Minahasa.

Berdasarkan dari perjuangan beberapa tokoh perempuan yang dijelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjuangan akan hak perempuan dasarkan pada sistem kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat. Dimana perempuan hanya memiliki ruang gerak terbatas di dalam rumah hanya untuk mengatur rumah dan keluarga saja. Sehingga atas keprihatinan tersebut beberapa tokoh perempuan yang memang memiliki status ini memiliki keinginan dalam mendongkrak adat istiadat yang sangat merugikan perempuan dengan melalui jalur pendidikan. Karena diketahui pada masa kolonial Belanda hak perempuan dalam dunia pendidikan tidak diberikan kecuali memang seorang perempuan tersebut dari kalangan tertentu.

KEMAMPUAN BERPIKIR PADA PEMBELAJARAN HAK PEREMPUAN

Materi pelajaran sejarah dalam proses pembelajaran di sekolah dapat diidentifikasi menjadi dua bagian, antara lain pengetahuan dari sejarah dianggap sebagai bagian dari pengetahuan kebudayaan dan pengetahuan ilmu- ilmu sosial sebagai bagian dari pengetahuan sejarah (Suliaman, 2012). Dalam setiap topik di dalam materi sejarah

yang diajarkan kepada peserta didik memiliki sebuah keunikan tersendiri dalam pembelajarannya seperti halnya adalah timbulnya nilai- nilai budaya di dalam sebuah kelompok atau golongan maupun ideologi sebagai warna sejarah yang diajarkan.

Sehingga melalui pembelajaran sejarah inilah memunculkan sebuah konsep yang menggugah kesadaran akan adanya kandungan konsep budaya dan nilai pada sikap yang dihasilkan seperti rela berkorban, kemanusiaan, persatuan bangsa dan pahlawan. Melalui konsep tersebut, hal yang didapat oleh peserta didik adalah potensi dari pembelajaran sejarah. Potensi – potensi tersebut antara lain, mengembangakan kemampuan berfikir kritis, sikap kepahlawanan dan kepemimpinan, rasa ingin tahu, kepedulian sosial, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mencari, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi.Sejarah dalam pembelajaran tidak terlepas pada pembahasan tentang pahlawan atau pemimpin masyarakat dan bangsanya. Kemudian akan memberikan sebuah pemahaman kepada peserta didik mengenai keberhasilan maupun kegagalan yang dihasilkan. Penanaman nilai keteladanan melalui sejarah menjadikan sebuah kajian bagi peserta didik untuk belajar sejarah dengan memikirkan hal yang kegiatan yang dilakukan oleh pahlawan atau pemimpin itu. Mengekspresikan diri sebagai pahlawan maupun pemimpin, peserta didik mampu mengawalinya dari mempelajari suatu fenomena di sekitar masyarakat atau bangsanya, mencari solusi, dan merencanakan tindakan kepahlawanan untuk menerapkan solusi tersebut (Hasan,2003).

Mempelajari sikap dari tokoh pahlawan diperlukannya sebuah pembawaan pengajaran yang baik dari pendidik untuk dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik. sehingga dampak yang dihasilkan dalam proses pembelajaran akan dikatakan berhasil. Keberhasilan dari sebuah pembelajaran terlihat dari bagaimana peserta didik mampu mengaplikasikan kemampuan potensi dalam pembelajaran sejarah ke dalam materi yang diajarkan. Dalam hal ini, materi yang diambil mengenai perjuangan para tokoh wanita yang mengangkat derajat sesama kaumnya merupakan bagian dari mendeklarasikan hak untuk perempuan melalui jalur pendidikan, menjadi suatu pembahasan yang menarik. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan dengan fenomena yang masih ada sampai saat ini.

Dengan masih adanya suatu diskriminasi yang di dapat oleh perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi sebuah tugas untuk para pendidik untuk menanamkan sebuah pemahaman akan persamaan posisi antara perempuan dengan laki-laki. Sehingga proses tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk dari pendidikan karakter atau dapat dikatakan sebagai sebuah pemberian pembelajaran untuk menanamkan karakter yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Sebagai gambaran, adanya sejarah dalam pembelajaran ditujukan untuk memperbaiki tatanan kehidupan masa kini dan masa depan dengan menghindari suatu peristiwa masa lalu agar tak terulang kembali. Oleh sebab itu, menghindari sebuah kejadian yang tidak diinginkan kembali, perlu adanya suatu proses pembelajaran yang menarik agar peserta didik dapat menganalisis sebuah peristiwa dengan kemampuan berpikirnya. Untuk mendapatkan sebuah kesempatan pada saat belajar sejarah peserta didik haruslah dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dalam bertanya dan belajar. Bukan sekedar berperilaku pasif menyerap informasi sebagai suatu kebenaran. Dalam mengembangkan kemampuan keterampilan berpikir kesejarahan terdapat lima bentuk bagian, antara lain:

1. *Chronological Thinking* (Berpikir kronologis) : tahapan awal yang dibangun dari pengertian waktu sebagai tujuan identifikasi urutan waktu pada setiap kejadian dan menjelaskan konsep kesinambungan antara sejarah dan perubahannya.
2. *Historical Comprehension*, yaitu suatu cakupan kemampuan dalam mendengarkan dan membaca cerita sejarah dengan tujuan mengembangkan sebuah gambaran tentang masa lalu dengan didasarkan pada pengalaman pelaku sejarah,artefak dan catatan sejarah di masanya.
3. *Historical Analysis* and *Interpretation*, kemampuan dalam membandingkan dan membedakan pengalaman, kepercayaan motivasi, tradisi dan ketakutan masyarakat pada kurun waktu yang beragam.
4. *Historical Research Capabilities*, mencakup kemampuan formulasi pertanyaan-pertanyaan sejarah berdasarkan dokumen bersejarah, foto-foto, artefak, kunjungan ke situs bersejarah, dan dari kesaksian pelaku sejarah.
5. *Historical issues-analysis and Decision Making*, mencakup kemampuan identifikasi permasalahan yang dikonfrontasikan masyarakat pada suatu literatur sejarah, komunitas lokal. (Ma'mur : 2008)

Melalui lima bentuk keterampilan berpikir kesejarahan tersebut dapat membuat sebuah pembelajaran sejarah lebih bermakna daripada hanya pengandalan dalam hal hafalan rangkaian fakta.

Adapun beberapa jenis keterampilan berpikir, antara lain keterampilan analitis, kreatif, kritis, dan reflektif. Keterampilan analitis melibatkan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dengan hati-hati untuk memecahkan masalah. Kreativitas mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinal. Kompetensi kritis melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis dan mempertanyakan asumsi yang mendasarinya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran berupa peserta didik mendapatkan kemampuan berpikir terhadap peristiwa sejarah adalah dengan cara pendidik membawa suatu pengajaran yang baik, yang mana hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana pendidik ini menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan di kelas.

KESIMPULAN

Menghubungkan antara permasalahan yang terjadi pada masa kini dengan peristiwa masa lalu menjadikan sebuah kemudahan pada pembelajaran sejarah, karena peserta didik akan dengan mudah dalam menggambarkan latar cerita maupun jalannya kehidupan di dalam narasi sejarah. Sebuah gambaran akan permasalahan mengenai hak perempuan yang mengalami diskriminasi oleh masyarakat dimana posisi dari perempuan diletakkan dalam posisi kedua setelah laki-laki. Perkembangan adanya sebuah kemunduran akan keadilan gender bagi wanita dimulai dari masa kolonial Belanda masuk dengan membawa sebuah legitimasi bahwa perempuan hanya memiliki ruang gerak dalam rumah saja. Hal ini dikarenakan adanya larangan ikut dalam menjalani sebuah pendidikan, kecuali dari golongan tertentu. Hal tersebut menjadikan sebuah keprihatinan oleh para tokoh pahlawan wanita, antara lain A.R. Kartini, R. Dewi Sartika, Nyai Ahmad dahlan, Maria Walanda Maramis. Tokoh – tokoh dengan sikap yang dapat dijadikan sebagai tauladan bagi peserta didik dalam menimbulkan rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Sehingga melalui pembelajaran sejarah ini diharapkan dapat mampu membawa peserta didik untuk berpikir kritis terhadap permasalahan perempuan-perempuan yang tidak memiliki kekuasaan untuk dapat mengubah adat istiadat yang telah melekat di masyarakat pada masa itu.

DAFTAR PUSTAKA

Adelsa, S., Wahyuni, A., & Purnomo, B. (2021). MENANAMKAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI SEJARAH HIDUP MARIA WALANDA MARAMIS DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PEREMPUAN DI INDONESIA. Al-Fikru: Jurnal Pendidikan Dan Sains, 2(1), 117-129.

Aeni, A. D., & Fachrurozi, M. H. (2022). Gerakan Emansipasi Perempuan dalam Bidang Pendidikan di Jawa Barat Pada Awal Abad Kedua Puluh. BIHARI: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN ILMU SEJARAH, 5(1).

Ahmad, A., & Jinggan, N. (2017). Pengaruh kompetensi kemahiran guru dalam pengajaran terhadap pencapaian akademik pelajar dalam mata pelajaran Sejarah. *JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik*, *3*(2), 1-11.

Aliyah, I. H., Komariah, S., & Chotim, E. R. (2018). Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, *1*(2), 140-153.

Anjani, K. T. (2019). Maria Walanda Maramis Sang Pelita Pendidikan Perempuan di Minahasa (1917-1924). Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 5(2), 40-47.

Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, *15*(1), 74-82.

Hartutik, H. (2015). RA KARTINI: EMANSIPATOR INDONESIA AWAL ABAD 20. SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan, 2(1), 86-96.

Heri, S. (2014). Seputar pembelajaran sejarah; isu, gagasan dan strategi pembelajaran.

Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Binamulia Hukum*, *7*(1), 71-81.

Ma'mur, T. (2008). Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah melalui Historical Thinking. *Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIP UPI*.

Pramudawardhani, I., & Estiana, E. (2019). Perjuangan Dan Pemikiran Ra Kartini Tentang Pendidikan Perempuan. Keraton: Journal of History Education and Culture, 1(1).

Prantiasih, A. (2016). Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 25(1).

Sirnayatin, T. A. (2017). Membangun Karakter Bangsa Melalui Pembelajaran Sejarah. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, *1*(3).

Sulaiman, S. (2012). Pendekatan konsep dalam pembelajaran sejarah. *Jurnal Sejarah Lontar*, *9*(1), 9-21.

Suryani, N. A., & Hudaidah, H. (2021). PEMIKIRAN RA KARTINI UNTUK RELEVANSI PENDIDIKAN KHUSUSNYA PADA KAUM WANITA DI INDONESIA. Profetika: Jurnal Studi Islam, 22(1), 119-122.

Syamsuddin, Helius. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.